

BAB 3

PROFIL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN PONOROGO

3.1 Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo terletak antara 111° 17' - 111° 52' Bujur Timur dan 7° 49' - 8° 20' Lintang Selatan dengan luas daerah 1.371,78 km². Ponorogo berbatasan langsung sebelah utara Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk, sebelah Timur Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, sebelah Selatan Kabupaten Pacitan serta sebelah Barat Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Jawa Tengah). Dilihat dari topografinya, Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi kecamatan Ngrayun, Sooko dan Pulung serta Kecamatan Ngebel sisanya merupakan daerah dataran rendah. Daerah yang terletak < 500 m diatas permukaan laut meliputi dari 241 desa, yang terletak 500 - 700 m diatas permukaan laut meliputi 44 desa, serta 18 desa berada pada ketinggian diatas 500 m diatas permukaan laut. Jumlah kecamatan dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan, yaitu Kecamatan Babadan, Badegan, Bungkal, Jambon Jenangan, Jetis, Kauman, Mlarak, Ngebel, Ngrayun, Ponorogo, Pudak, Pulung, Sambit, Sampung, Sawoo, Siman, Slahung, Sokoo, dan Kecamatan Sukorejo.

Jumlah kepala keluarga pada Kabupaten Ponorogo pada tahun 2008 adalah 253.363 kk dengan jumlah penduduk 895.921 jiwa. Jumlah unit usaha yang terdaftar pada pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah 8.903 unit usaha. Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Ponorogo 2008 sebanyak 50,04 % menggunakan akses air bersih dari sumur gali, sumber permukaan tanah seperti sungai dan danau atau bendungan sebesar 15,56%, penampungan air hujan 0,07%. Penduduk yang mendapat akses air minum berdasarkan data PDAM Kabupaten Ponorogo tahun 2008 adalah sebanyak 129.657 orang.

3.2 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ponorogo

3.2.1 Pendirian dan struktur organisasi PDAM Kabupaten Ponorogo

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo. Semula, pengelolaan air minum di daerah Kabupaten Ponorogo dikelola oleh sebuah Badan Pengelola Air Minum (BPAM) yang kemudian statusnya ditingkatkan menjadi perusahaan daerah. Berdasarkan modal yang ditanamkan, maka modal awalnya dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.60,57 juta dan dari penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo sebesar Rp.5,44 milyar. Tugas pokok PDAM Kabupaten Ponorogo adalah menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.

Penjabaran tugas utama PDAM Kabupaten Ponorogo yaitu : dari sisi input dan proses adalah membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum. Dari sisi output PDAM bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat. Berdasarkan fungsi pengawasan PDAM bertugas untuk mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien. Ditambahkan bahwa pada tugas pengawasan bahwa PDAM menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah pengambilan air secara liar. Dari sisi komersial PDAM Kabupaten Ponorogo berfungsi untuk memupuk kekayaan/ meningkatkan pendapatan daerah.

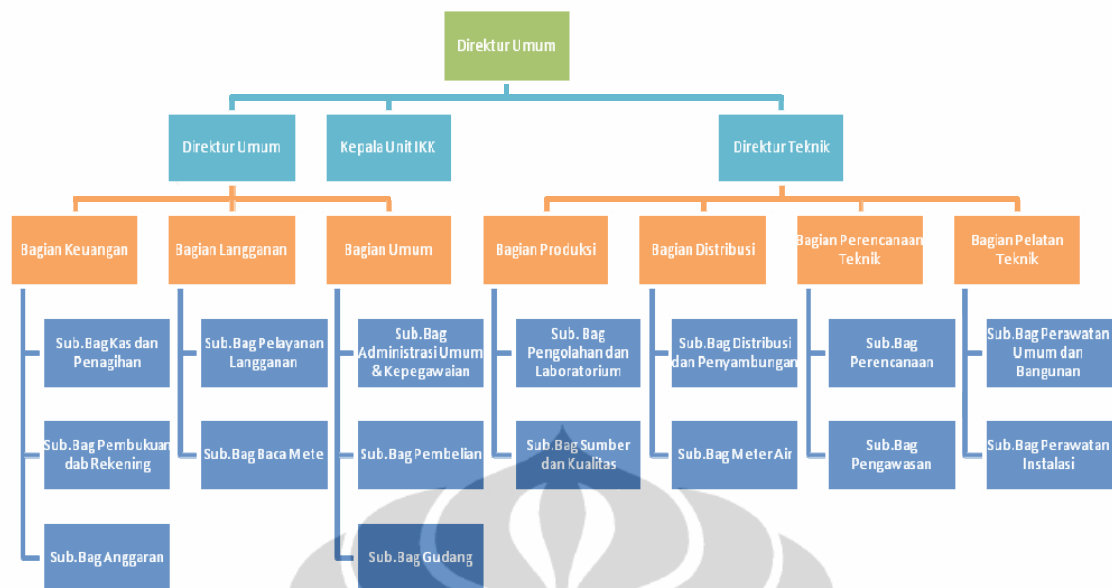
Peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo (dalam hal ini Bupati Ponorogo) terhadap pengelolaan dan kebijakan PDAM Kabupaten Ponorogo antar lain adalah pada penunjukan dan pengangkatan jajaran direksi PDAM, persetujuan dan pengesahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam hal kontrol atas pengelolaan PDAM Kabupaten Ponorogo melalui Badan Pengawas. Badan

Pengawas beranggotakan Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo dan pejabat perangkat daerah lainnya.

1.2.2. Aspek administrasi

PDAM Kabupaten Ponorogo dipimpin oleh seorang direktur utama dan dibantu oleh dua direktur pada masing-masing bidangnya. Penentuan/penunjukan dan pengangkatan jajaran direksi PDAM Kabupaten Ponorogo dilakukan oleh Bupati Ponorogo berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo. Penentuan direksi PDAM Ponorogo saat ini belum dilakukan dengan uji kelayakan dan kepatutan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Direktur utama bertanggungjawab kepada Bupati Ponorogo melalui Badan Pengawas. Direktur umum membawahi bagian keuangan, bagian langganan dan bagian umum serta bertanggungjawab pada direktur utama. Direktur teknik juga bertanggungjawab langsung kepada direktur utama dan membawahi bagian produksi, bagian distribusi, bagian perencanaan teknik dan bagian peralatan teknik. Selain itu direktur utama juga membawahi 13 unit Ibu Kota Kecamatan (Unit IKK). Unit IKK bertugas pada wilayah kerja yang telah ditentukan. Adapun struktur organisasi PDAM Kabupaten Ponorogo seperti di bawah ini :



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PDAM Kabupaten Ponorogo

Struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing unit kerja PDAM Kabupaten Ponorogo mengacu pada Keputusan Bupati Ponorogo No.589 tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kab.Ponorogo. Semua jabatan dalam struktur di atas pada tahun 2007-2009 telah terisi dan masing-masing bagian aktif menjalankan tugasnya. Masing-masing bagian maupun unit IKK secara kontinyu membuat laporan tentang aktivitas dan hasil dari pekerjaan/tugasnya. Bentuk laporan internal yang dibuat adalah antara lain adalah laporan teknik bulanan. Isi laporan teknik antara lain adalah laporan operasi dan pengolahan, laporan pemakaian dan kehilangan air, laporan produksi dan distribusi, rekapitulasi jaringan air, cakupan pelayanan dan tindakan pengawasan jaringan serta kualitas air. Laporan teknik diserahkan pada bagian perencanaan paling lambat tanggal 15 pada setiap bulannya dan telah dilaksanakan secara tepat waktu. Laporan internal lainnya berupa laporan realiasi keuangan bulanan yang berisi perkembangan realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Dari laporan realisasi RKAP bulanan sampai berakhirnya tahun buku bersangkutan, kemudian disusun laporan keuangan tahunan sebagai laporan

eksternal PDAM. Bagian keuangan bertanggungjawab menyusun Laporan Keuangan Tahunan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM. Laporan keuangan akan diaudit terlebih dahulu oleh akuntan publik atau akuntan eksternal pemerintah. Setelah melalui proses audit, maka laporan keuangan akan diserahkan kepada Badan Pengawas dan Bupati Ponorogo sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola PDAM Kabupaten Ponorogo.

Pada saat penelitian ini dilakukan, PDAM Kabupaten Ponorogo belum mempunyai perencanaan jangka panjang (*corporate plan*). Rencana jangka panjang PDAM merupakan rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Perencanaan yang dilakukan masih terbatas dalam satu tahun buku dalam siklus akuntansi. Perencanaan dilakukan berdasarkan usulan dari masing-masing Unit IKK dan bagian-bagian dalam struktur organisasi. Setelah melalui seleksi anggaran oleh jajaran direksi, maka usulan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Acuan RKAP didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi. Draf RKAP kemudian diusulkan pada Badan Pengawas dan kemudian diserahkan pada Bupati Ponorogo. Pembahasan RKAP dilakukan oleh jajaran direksi PDAM Kabupaten Ponorogo dan Badan Pengawas. Setelah pembahasan dan dievaluasi serta disetujui oleh Badan Pengawas, maka Badan Pengawas akan mengajukan hasil pembahasan RKAP tersebut kepada Bupati Ponorogo. Atas persetujuan Badan Pengawas tersebut, RKAP kemudian disahkan oleh Bupati Ponorogo. RKAP menjadi acuan beroperasinya PDAM Kabupaten Ponorogo dalam satu tahun yang telah ditentukan.

Dari sisi teknik, untuk pedoman pekerjaan di lapangan diperlukan gambar nyata laksana yang berisi rincian dan gambaran jaringan pipa distribusi. Sampai saat ini gambar nyata laksana yang lengkap dan disatukan dalam bentuk gambar nyata laksana belum dilakukan. Begitu juga pada

masing-masing unit IKK juga gambar nyata laksana belum terbaharui dengan data jaringan terbaru. Pemanfaatan teknologi berupa Geographic Information System (GIS) belum dimanfaatkan sebagai bagian dari gambar nyata laksana. Perbaikan dan penambahan jaringan distribusi dilakukan berdasarkan data dan gambar nyata laksana yang terpisah-pisah, tergantung asal proyek jaringan tersebut.

Untuk mengadakan pelayanan air minum yang merata bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo, maka dibentuklah 13 Unit Ibu Kota Kecamatan (IKK) dan satu induk pelayanan pusat yang terletak di ibukota Kabupaten Ponorogo. Rincian unit pelayanan tersebut adalah :

Tabel 3.1 Unit Pelayanan PDAM Kabupaten Ponorogo

No.	Unit Pelayanan
1.	Unit IKK Badegan
2.	Unit IKK Bungkal
3.	Unit IKK Slahung
4.	Unit IKK Sooko
5.	Unit IKK Babadan
6.	Unit IKK Kauman
7.	Unit IKK Jenangan
8.	Unit IKK Mlarak
9.	Unit IKK Balong
10.	Unit IKK Sawoo
11.	Unit IKK Sampung
12.	Unit IKK Pulung
13.	Unit IKK Jetis
14.	Basic Net Area (BNA) Ponorogo

Sumber: Bagian Hubungan Langganan

Unit IKK Jetis, Unit IKK Mlarak dan Unit IKK Balong untuk pengelolaannya di bawah satu kepala unit. Masing-masing Unit IKK tersebut bertugas memberikan pelayanan berupa penyambungan baru, penanganan keluhan dan laporan, serta penerimaan pembayaran rekening air pelanggan PDAM.

Prosedur operasi standar PDAM Kabupaten Ponorogo ditetapkan Direktur Utama pada tanggal 6 September 2007. Prosedur operasi standar tersebut dicantumkan dalam Keputusan No.68 Tahun 2007 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik PDAM Kab. Ponorogo. Pedoman tersebut meliputi standar pelayanan pengaduan, pelayanan sambungan baru, dan pengiriman tangki air.

Pada standar penanganan pengaduan telah ditentukan persyaratan pelayanan, waktu pelayanan, prosedur pengajuan dan proses penyelesaian. Jika ada keluhan dan laporan oleh pelanggan diterima oleh sub. Bagian hubungan dan langganan ataupun karyawan Unit IKK, maka sesuai dengan keluhan akan diteruskan kepada petugas penyelesaian gangguan. Keluhan dapat disampaikan selama 24 jam. Keluhan yang biasa diterima adalah keluhan mengenai melonjaknya tagihan air, macetnya sambungan air, kekeruhan air yang diterima pelanggan. Untuk laporan masyarakat yang sering diterima adalah kerusakan atau kebocoran jaringan. Standar waktu penanganan keluhan akan ditangani pada hari itu juga oleh petugas PDAM sampai selesainya pekerjaan perbaikan. Keluhan yang berkaitan dengan masalah administrasi dilakukan pada jam kerja. Dari data bagian hubungan langganan, pada tahun 2009 terdapat 780 keluhan pelanggan dan semuanya telah terselesaikan. Tahun 2007 dan 2008 terdapat 780 keluhan dan 758 keluhan yang kesemuanya terselesaikan.

Penanganan pada permintaan sambungan baru dilakukan pada jam kerja. Pengajuan langganan baru dilakukan oleh calon pelanggan dengan mendaftarkan pada sub. bagian hubungan dan langganan atau petugas PDAM di masing-masing unit IKK. Setelah melalui serangkaian prosedur dan

perhitungan biaya yang harus dibayar pelanggan, maka paling lambat selama 5 hari kalender sambungan air harus terpasang pada lokasi yang diminta pelanggan. Pada tahun 2007-2009 penyambungan baru dapat dilakukan dalam 4-5 hari kerja.

Standar pelayanan pada pengiriman melalui mobil tangki air dibedakan untuk tiga jenis permintaan, yaitu untuk keperluan pribadi, untuk bantuan kekeringan dan untuk kepentingan sosial. Jika untuk keperluan pribadi langsung diajukan pada bagian pelayanan PDAM. Untuk bantuan kekeringan diajukan melalui Bupati Ponorogo dan untuk kepentingan sosial oleh organisasi tertentu langsung diajukan kepada direktur utama PDAM Kabupaten Ponorogo. Tarif yang dikenakan untuk pengiriman air melalui tangki air dikenakan sesuai tarif penjualan air melalui tangki air. Pembayaran menjadi tanggungjawab pribadi, atau organisasi yang meminta pengiriman, atau pemerintah daerah. Kompensasi sebesar 10% dari pembayaran akan diberikan jika PDAM terlambat mengirimkan air sesuai waktu yang telah disepakati.

Jumlah karyawan PDAM Kabupaten Ponorogo sebanyak 106 orang yang terdiri dari 101 karyawan tetap dan 5 karyawan kontrak. Latar belakang pendidikan karyawan terdiri dari 2 orang dengan tingkat pendidikan S-2, 3 orang S-1, 1 orang D-2, dan 95 orang berlatar belakang pendidikan SLTA/ sederajat, serta SLTP sebanyak 5 orang. Pedoman penilaian atas pekerjaan karyawan PDAM Kabupaten Ponorogo yang selama ini dilakukan adalah berdasarkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil. Penilaian pelaksanaan pekerjaan karyawan dilakukan pada setiap akhir tahun dan hasilnya akan diserahkan pada yang bersangkutan pada awal tahun berikutnya. Berdasarkan rasio karyawan pada setiap 1000 pelanggan, diketahui bahwa pada tahun 2009 rasio karyawan PDAM Kabupaten Ponorogo adalah 6,9. Rasio karyawan pada tahun 2007-2008 adalah 8,22 dan 7,1, sehingga sampai tahun 2009 menunjukkan rasio yang semakin menurun. Rasio tersebut menurun karena pada tahun 2008 karyawan PDAM Kabupaten Ponorogo menurun 13 orang dari karyawan tahun 2007

Universitas Indonesia

sebanyak 119 orang. Kenaikan rasio karyawan per 1000 pada tahun 2009 lebih dikarenakan kenaikan jumlah pelanggan.

3.2.3 Aspek operasional

Konsumen PDAM Kabupaten Ponorogo pada akhir tahun 2007-2009 tercatat berturut-turut sebanyak 14.471 sambungan rumah (SR), 14.878 SR, dan 15.323 SR yang aktif. Dengan sambungan aktif yang ada tersebut, PDAM Kabupaten Ponorogo melayani penduduk Kabupaten Ponorogo sebanyak 91.938 orang dari keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 927.995 orang. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa cakupan pelayanan PDAM Kabupaten Ponorogo pada tahun 2009 adalah 9,91%. Cakupan pelayanan pada tahun 2007-2009 tercatat semakin meningkat dari tahun ketahun yaitu sebesar 9,41% pada tahun 2007 dan 9,65% pada tahun 2008, serta tahun 2009 sebesar 9,91%.

Sambungan rumah (SR) dikategorikan dalam 4 kelompok dan secara keseluruhan terdiri dari 8 jenis dengan rincian beserta jumlahnya dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Kelompok Pelanggan Dan Jumlah Pelanggan Aktif PDAM Tahun 2009

No.	Kelompok Pelanggan	Jumlah Pelanggan Tahun 2007 (SR)	Jumlah Pelanggan Tahun 2008 (SR)	Jumlah Pelanggan Tahun 2009 (SR)
1.	Kelompok I			
	Sosial Umum	223	191	186
	Sosial Khusus	328	333	350
2.	Kelompok II			
	Rumah Tangga (A)	13.491	13.931	14.365
	Rumah Tangga (B)	229	226	228

(Lanjutan)

3. Kelompok III			
Pemerintah, TNI dan Polri	168	165	156
Niaga Kecil dan Industri Kecil	30	29	28
4. Kelompok IV			
Niaga Besar	2	2	10
Industri Besar	0	0	0
Jumlah	14.471	14.878	15.323

Sumber: diolah dari Bagian Pelanggan dan Bagian Perencanaan

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa pelanggan terbanyak adalah kelompok Rumah Tangga (A) atau pelanggan rumah tangga yang di dalam rumah tangga tersebut berfungsi sebagai tempat tinggal. Kemudian berturut turut adalah kelompok sosial khusus (sekolah, puskesmas, tempat ibadah), kelompok rumah tangga B (terdapat tempat usaha dalam rumah tangga tersebut), kelompok sosial umum (kamar mandi dan wc umum, kran umum), kemudian kelompok kantor pemerintah, TNI dan Polri, serta kelompok niaga kecil/industri kecil). Untuk pelanggan kelompok niaga besar hanya terdiri dari 10 pelanggan pada tahun 2009.

Pengklasifikasian pelanggan tersebut di atas berkaitan dengan pengenaan tarif air minum yang berbeda-beda. Besaran tarif diusulkan oleh direksi PDAM kepada Badan Pengawas yang kemudian dilaporkan pada Bupati Ponorogo. Usulan penyesuaian tarif kemudian dibicarakan bersama DPRD Kabupaten Ponorogo untuk mendapat persetujuan. Penyesuaian tarif terakhir diberlakukan berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo No.4 Tahun 2009.

Produksi air minum dilakukan pada 28 sumur bor dan 4 sumber air permukaan di berbagai lokasi. Kapasitas terpasang pada sumur-sumur tersebut pada tahun 2009 dan 2008 tercatat 208 l/detik dan kapasitas terpakai 191 l/detik. Tahun 2007 kapasitas terpasang 237 l/detik dan kapasitas

terpakai 167 l/detik. Dari sumur dan sumber air tersebut dapat diketahui juga produksi air dan air yang terdistribusi. Karena produksi air tersebut tanpa melewati pengolahan maka air yang diproduksi akan sama dengan air yang terdistribusi. Keduanya diukur dengan meter air yang tersedia pada tiap sumur produksi tersebut. Adapun air yang diproduksi dan terdistribusi tahun 2007-2009 tercatat semakin meningkat, berturut-turut 3,82 juta m³, 3,82 juta m³, dan 4,16 juta m³. Setelah air minum diproduksi pada sumur produksi kemudian air didistribusikan ke pelanggan. Pengukuran air minum yang diterima oleh pelanggan didasarkan pada meter air pelanggan dengan ukuran per m³.

Dengan membandingkan antara keseluruhan air terdistribusi ke pelanggan dengan keseluruhan hasil pencatatan meter oleh petugas meter air maka akan didapatkan jumlah kehilangan air. Data air yang terdistribusi dan air yang terjual selama tahun 2009 adalah 4,16 juta m³ dan 2,81 juta m³, sehingga jumlah kehilangan air adalah sebesar 1,34 juta m³. Identifikasi mengenai jumlah kehilangan air selama ini belum dapat dipastikan sebabnya, apakah disebabkan oleh ketidakcermatan dalam pembacaan meter atau kebocoran pada pipa distribusi. Upaya yang telah dilakukan untuk menekan kehilangan air adalah dengan pemeriksaan pada meter konsumen, inspeksi jaringan distribusi dan penanganan laporan kebocoran/ kerusakan pipa distribusi dengan segera. Peneraan meter air yang telah dilakukan pada tahun 2009 adalah sebanyak 448 unit atau 2,9% dari total pelanggan sebanyak 15,323 SR. Tahun 2007 dan 2008 peneraan meter air pelanggan yang dilakukan pada 607 unit dan 816 unit. Menurut Kepala Bagian Distribusi PDAM Kabupaten Ponorogo, peneraan meter air bertujuan untuk memberikan keyakinan pada pelanggan akan jumlah air yang dikonsumsinya. Selain itu, peneraan meter air juga berguna bagi PDAM karena akan memberi keyakinan mengenai air yang terjual kepada pelanggan.

Kontinuitas aliran air dan kualitas air merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan. Bagian distribusi melakukan pengecekan kontinuitas tekanan aliran air secara periodik. Namun, menurut

laporan teknik bulan Desember tahun 2009 diketahui bahwa masih terdapat 453 SR pelanggan yang tidak teraliri air. Pada tahun 2007-2009 jumlah pelanggan yang tidak teraliri air berturut-turut sebanyak 784 SR dan 720 SR. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perawatan, Produksi dan Kepala Unit IKK Jenangan serta staf Unit IKK Pulung diketahui bahwa adanya hal tersebut karena adanya perbedaan tinggi lokasi pelanggan dengan debit serta tekanan air yang tidak cukup. Berkaitan dengan kualitas air, bagian produksi melakukan pengecekan kualitas air secara terjadwal pada masing-masing Unit IKK. Kualitas air diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 Tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak (Bapenas, 2003). Berdasarkan pengujian laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, kualitas air yang didistribusikan ke pelanggan masuk dalam kategori air bersih. Untuk menuju ke persyaratan kualitas air minum, menurut keterangan Kepala Bagian Produksi dan Kepala Bagian Distribusi, diperlukan pengolahan tambahan bagi air yang akan didistribusikan. Pengolahan tambahan tersebut antara lain dengan penambahan kaporit, sedangkan penambahan kaporit yang telah dilakukan banyak menimbulkan keluhan oleh pelanggan.

3.2.4 Aspek keuangan

Laporan Keuangan disampaikan pengelola PDAM Kabupaten Ponorogo kepada Bupati Ponorogo melalui Badan Pengawas. Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan PDAM Kabupaten Ponorogo oleh jajaran Direksi PDAM yang telah ditunjuk oleh Bupati Ponorogo. Pengaturan ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan PDAM telah diatur dalam pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Universitas Indonesia

No.2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. Bahwa dalam peraturan tersebut, Laporan Keuangan Tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah (dhi. Bupati Ponorogo) paling lambat 120 hari setelah tahun buku PDAM ditutup. Pada Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Ponorogo tahun 2009 terlambat disampaikan kepada Bupati Ponorogo. Hal tersebut diketahui dari tanggal penyelesaian audit atas Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Ponorogo pada tanggal 3 Mei 2010. Untuk hasil audit Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Ponorogo tahun 2008 tercatat tanggal 25 Mei 2009, dan untuk tahun 2007 pada tanggal 23 Mei 2008.

Untuk memudahkan analisa Laporan Keuangan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Ponorogo tahun 2009, 2008, 2007 (Lihat Lampiran 1A dan 1B) dapat digunakan gambaran common size dari laporan keuangan tersebut. Gambaran common size digunakan untuk mengetahui distribusi, kenaikan dan penurunan dari komponen laporan keuangan. Kondisi common size Neraca PDAM Kabupaten Ponorogo tahun 2007-2009 tergambar dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 Gambaran *Common Size* Neraca PDAM Kabupaten Ponorogo Tahun 2007-2009

No.	Uraian	Per 31-12-2007	Per 31-12-2008	Per 31-12-2009
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	AKTIVA LANCAR			
1	Kas dan Bank	19.52%	22.72%	30.24%
2	Piutang Usaha	13.99%	14.01%	14.21%
3	Penyisihan Piutang Usaha	-4.29%	-4.64%	-4.75%
4	Piutang Usaha Netto	9.71%	9.37%	9.45%
5	Beban Dibayar di Muka	0	0.01%	0.06%
6	Persediaan Bahan Operasi	0.39%	0.59%	0.51%
	<i>Jumlah Aktiva Lancar</i>	29.63%	32.69%	40.27%
II	AKTIVA TETAP			
7	Aktiva Tetap	181.55%	180.64%	164.78%
8	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	-121.65%	-125.81%	-116.16%
9	<i>Nilai Buku Aktiva Tetap</i>	59.90%	54.83%	48.62%
III	AKTIVA LAIN-LAIN			
10	Persediaan Bahan Instalasi	2.59%	4.24%	3.88%

Universitas Indonesia

(Lanjutan)

No.	Uraian	Per 31-12-2007	Per 31-12-2008	Per 31-12-2009
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Aktiva Tidak Digunakan			
11	Harga Perolehan	10.16%	9.90%	8.69%
12	Akumulasi Penyusutan	-5.35%	-5.22%	-4.58%
13	Nilai Buku Aktiva Non Produktif	4.80%	4.68%	4.11%
	<i>Jumlah Aktiva Lain-lain</i>	10.48%	12.48%	11.11%
	JUMLAH AKTIVA	100%	100%	100%
IV	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
14	Hutang Usaha	0.32%	0.46%	0.08%
15	Hutang Non Usaha	0.00%	0.07%	0.10%
16	Beban yang Masih Harus Dibayar	152.20%	98.11%	186.85%
17	Hutang Jangka Panjang Jatuh Tempo	68.37%	79.99%	77.98%
18	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0.74%	1.67%	0.72%
	<i>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</i>	221.63%	180.30%	265.74%
V	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
19	Kewajiban Kepada Pemerintah Pusat	41.02%	26.66%	15.60%
20	Kewajiban Jangka Panjang Lainnya	0.83%	1.02%	0.17%
	<i>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</i>	41.85%	27.68%	15.77%
VI	KEWAJIBAN LAIN-LAIN			
21	Denda Bunga dan Pokok Pinjaman		75.15%	0.00%
22	Uang Jaminan Lagganan	0.52%	0.50%	0.44%
23	Cadangan Dana Meter	8.33%	8.52%	8.09%
	<i>Jumlah Kewajiban Lain-lain</i>	8.84%	84.18%	8.53%
	<i>Jumlah Kewajiban</i>	272.32%	292.16%	290.05%
VII	EKUITAS			
	Modal :			
24	Modal Dasar	0.87%	0.85%	0.74%
25	Penyertaan Pemerintah Daerah	78.19%	76.23%	66.89%
	<i>Jumlah Modal</i>	79.06%	77.08%	67.63%
	Laba (Rugi) Ditahan :			
26	Saldo Laba (Rugi) Ditahan	-251.38%	-269.24%	-257.68%
27	Jumlah Ekuitas	-172.32%	-192.16%	-190.05%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	100%	100%	100%

Sumber : diolah dari Laporan Keuangan PDAM Kab.Ponorogo Tahun 2007, 2008, dan 2009

Sesuai tabel 3.3 dari sisi aktiva lancar menunjukkan trend yang positif. Dari tahun 2007 proporsi aktiva lancar terhadap total aktiva sebesar 29,63% meningkat menjadi 40,27% di tahun 2009. Komponen aktiva lancar terbesar pada tahun 2009 terdapat pada sisi kas dan bank, secara riil dengan nilai

Rp2,460,194,813,00 dari total aktiva lancar sebesar Rp.3.276,077,654,00. Peningkatan kas dan bank ditahun 2009 karena PDAM Kabupaten Ponorogo memberlakukan tarif baru berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo No.4 Tahun 2009.

Pada sisi aktiva tetap, memiliki proporsi yang paling besar dari total aktiva tetap yaitu berturut-turut dari tahun 2007-2009 sebesar 59,9%, 54,8%, 48,6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa operasional PDAM membutuhkan investasi yang besar. Operasional PDAM berupa instalasi sumur-sumur pompa air baku dan jaringan perpipaan menurut wilayah kerja masing-masing Unit IKK dan BNA Kota Ponorogo. Namun, proporsi aktiva tetap terhadap total aktiva tersebut dari tahun 2007-2009 semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa penyusutan aktiva tetap tidak diimbangi dengan investasi baru yang signifikan.

Pada sisi (kewajiban dan ekuitas), proporsi jumlah modal semakin lama semakin menurun dari tahun 2007 sebesar 79,06% menjadi 67,63% ditahun 2009. Sebaliknya pada proporsi jumlah kewajiban dari tahun ke tahun semakin meningkat, terlihat pada tahun 2007 sebesar 272,32% dan pada tahun 2009 menjadi 290,05%. Dari tahun 2007-2009 proporsi kewajiban jangka pendek lebih dominan dari kewajiban jangka panjangnya. Hal ini menunjukkan bahwa PDAM Kabupaten Ponorogo pada belum mampu membayar kewajiban jangka pendeknya dari tahun tahun sebelumnya. Proporsi lebih dari 100% pada jumlah kewajiban menunjukkan bahwa PDAM Kabupaten Ponorogo memiliki hutang yang sangat besar atau lebih dari 2,5x dari total aktiva yang dimiliki PDAM. Begitu juga pada proporsi jumlah ekuitas saldo laba (rugi) yang besar karena adanya akumulasi kerugian.

Gambaran common size untuk laporan laba (rugi) tahun 2007-2008 akan memberikan gambaran mengenai perkembangan penerimaan dan biaya pada tahun yang bersangkutan. Penggunaan common size pada laporan laba rugi ditentukan dengan menggunakan penjualan/pendapatan usaha sebagai standar 100%. Pos lain dalam laporan laba rugi dibandingkan terhadap pos standar tersebut. Gambaran common size Laporan Laba Rugi PDAM Kabupaten Ponorogo Tahun 2007-2009 adalh sebagai berikut :

Universitas Indonesia

Tabel 3.4 Gambaran *Common Size* Laba (Rugi) PDAM Kabupaten Ponorogo Tahun 2007-2009

No.	Uraian	Per 31-12-2007	Per 31-12-2008	Per 31-12-2009
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	PENDAPATAN USAHA			
1	Jumlah Pendapatan Usaha	100%	100%	100%
II	BEBAN LANGSUNG USAHA			
2	Beban Langsung Usaha	60.50%	59.46%	48.11%
3	Laba (Rugi) Kotor	39.50%	40.54%	51.89%
III	BEBAN USAHA			
4	Administrasi dan Umum	85.93%	78.79%	84.37%
5	Laba (Rugi) Usaha	-46.42%	-38.25%	-32.48%
IV	PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
6	Pendapatan dan Beban Lain-lain	0.02%	2.76%	2.02%
	Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	-44.71%	-35.49%	-30.47%
	Aktiva Pajak Tangguhan			0.42%
	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	-44.71%	-35.49%	-30.05%

Sumber : diolah dari Laporan Keuangan PDAM Kab.Ponorogo Tahun 2007, 2008, dan 2009

Pada sisi beban langsung usaha dari tahun 2007-2009 menunjukkan proporsi terhadap pendapatan usaha yang semakin menurun. Proporsi beban langsung usaha terhadap pendapatan usaha sebesar 48,11% pada tahun 2009 berarti setiap pendapatan usaha Rp.1,00 maka sebesar Rp0,48 adalah beban langsung usaha. Dengan proporsi beban langsung usaha yang semakin menurun menunjukkan PDAM Kabupaten Ponorogo semakin efisien dalam beban langsung usahanya.

Beban usaha administrasi dan umum menggambarkan proporsi yang besar terhadap penjualan pada tahun 2007-2009 dan relatif berfluktuasi. Proporsi beban usaha administrasi dan umum terhadap pendapatan usaha sebesar 84,37% pada tahun 2009 menunjukkan bahwa setiap pendapatan usaha Rp1,00, diperlukan beban usaha administrasi dan umum sebesar Rp0,84. Dengan proporsi beban usaha administrasi dan umum yang besar maka PDAM Kabupaten Ponorogo akan semakin kesulitan untuk mendapatkan laba.

Untuk memudahkan dalam analisis rasio keuangan yang akan digunakan dalam penilaian kinerja aspek keuangan, maka diperlukan data keuangan yang diolah dari Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Ponorogo dari tahun 2007-2008 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Data Keuangan PDAM Kab. Ponorogo Tahun 2007-2009*

No.	Uraian	Tahun 2007 (Rp)	Tahun 2008 (Rp)	Tahun 2009 (Rp)
1	Piutang Usaha	675,607,764.00	668,672,722.00	769,201,352.00
2	Aktiva Lancar	2,061,976,883.00	2,333,888,907.00	3,276,077,654.00
3	Aktiva Produktif	6,230,874,129.00	6,248,109,277.00	7,231,908,487.00
4	Total Aktiva	6,960,212,332.00	7,138,805,708.00	8,136,078,651.00
5	Hutang Lancar	15,425,912,865.00	12,871,252,466.00	21,621,029,815.00
6	Hutang Jangka Panjang	2,912,749,920.00	1,976,234,300.00	1,282,975,200.00
7	Total Hutang	18,954,150,585.00	20,856,664,525.00	23,598,329,565.00
8	Ekuitas/Modal dan Cadangan	-11,993,938,253.00	- 13,717,858,817.00	- 15,462,250,914.00
9	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	- 2,076,363,161.00	- 1,723,920,564.00	- 1,768,640,896.00
10	Penjualan Air	4,449,034,633.00	4,633,172,320.00	5,587,687,293.00
11	Pendapatan Operasi	4,644,588,013.00	4,857,809,341.00	5,804,725,588.00
12	Biaya Operasi	6,800,745,600.00	6,715,861,303.00	7,690,327,116.00
13	Angsuran (Pokok+Bunga) Jatuh Tempo	15,336,781,181.00	18,069,759,799.00	21,536,166,070.00
14	Laba Operasi Sebelum Penyusutan	- 1,465,747,748.00	- 1,209,991,036.00	- 1,415,927,938.00
15	Jumlah Penjualan per Hari	12,901,633.37	13,493,914.84	16,124,237.74
16	Rekening Tertagih	4,226,582,901.00	4,401,513,704.00	5,308,302,928.00

Sumber : Laporan Keuangan PDAM Tahun 2007, 2008, 2008, dan Lap.Evaluasi Kinerja PDAM tahun 2007 dan 2008. * : perhitungan atas data keuangan ini dapat dilihat pada Lampiran 2

Nilai paling menonjol dari Tabel 3.5 adalah besarnya total hutang dari tahun 2007-2009 yang semakin meningkat, terlihat di tahun 2007 sebesar Rp18,95 milyar dan di tahun 2009 menjadi Rp23,59 milyar. Dari total hutang yang ada, yang paling besar nilainya adalah hutang lancar. Hutang lancar yang tercatat pada tahun 2009 adalah Rp21,62 milyar atau 91,64% dari total hutang PDAM Kabupaten Ponorogo pada tahun 2009. Selain itu, akumulasi kerugian yang tercatat pada ekuitas/modal dan cadangan dari tahun 2007-2009 juga semakin meningkat dari -Rp.11,99 milyar ditahun 2007 menjadi -Rp.15,46 milyar ditahun 2009.

Universitas Indonesia